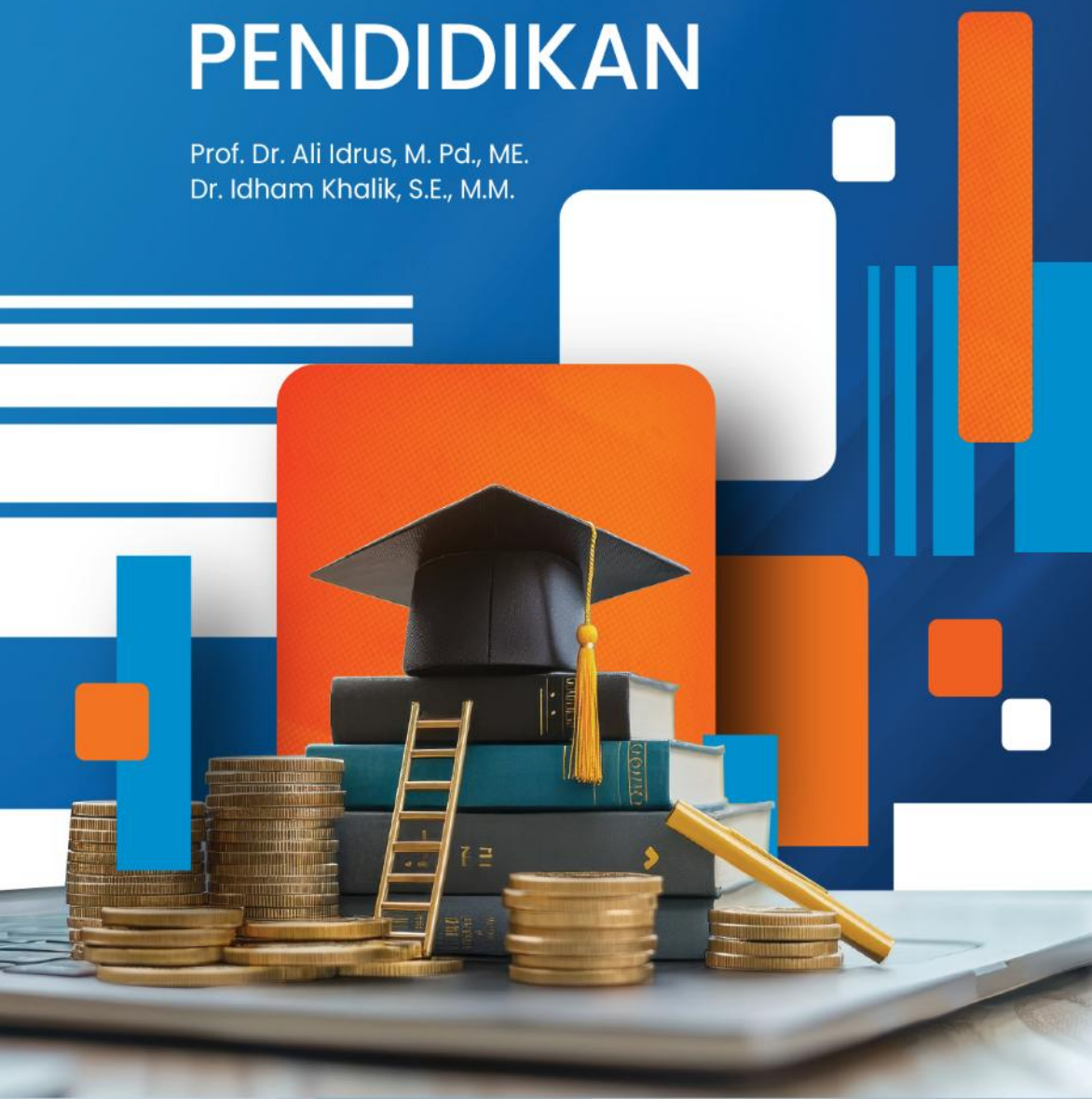


MANAJEMEN KEUANGAN DAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

Prof. Dr. Ali Idrus, M. Pd., ME.
Dr. Idham Khalik, S.E., M.M.



***Manajemen Keuangan
dan
Pembiayaan Pendidikan***



Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan

Prof. Dr. Ali Idrus, M. Pd., ME.

Dr. Idham Khalik, S.E., M.M.

2025

Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan

Penulis:

Prof. Dr. Ali Idrus, M. Pd., ME. dan Dr. Idham Khalik, S.E., M.M.

Penyunting:

Inggang Perwangsa Nuralam
Muhammad Nazil
Dindha Ayu Mitra Dyani
Sekaring Tyas Widyardini

ISBN:

978-634-7148-13-1

Perancang Sampul:

Syifa Ismayanti

Penata Letak:

Sekaring Tyas Widyardini

Pracetak dan Produksi:

Tim RCI

Penerbit:

Redaksi:

Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
ANGGOTA IKAPI JAWA BARAT
Pondok Karisma Residence Jalan Raflesia VI D.151
Panglayungan, Cipedes Tasikmalaya – 085223186009

Website : www.rcipress.rcipublisher.org

E-mail : rumahcemerlangindonesia@gmail.com

Cetakan Pertama, Maret 2025

i-xiii+234 hlm, 15.5 cm x 23.5 cm

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

All Rights Reserved

Buku ini diterbitkan Bekerjasama dengan Lektantara

Dilarang keras memfotokopi atau memperbanyak sebagian
atau seluruh buku ini tanpa seizin tertulis dari penerbit

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan buku berjudul "Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan". Buku ini disusun dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai manajemen pembiayaan pendidikan yang merupakan salah satu elemen penting dalam mendukung keberhasilan dan keberlanjutan sektor pendidikan, khususnya di Indonesia.

Pendidikan adalah pondasi utama dalam membangun generasi yang unggul dan berdaya saing tinggi. Di tengah berbagai tantangan global yang semakin kompleks, pengelolaan pembiayaan pendidikan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan menjadi aspek yang sangat penting. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, institusi pendidikan diharapkan mampu menyediakan fasilitas pembelajaran yang memadai, dan juga menciptakan sistem pendidikan yang inklusif dan berkualitas. Buku ini kami hadirkan sebagai upaya untuk memberikan wawasan serta panduan praktis mengenai berbagai aspek penting dalam manajemen keuangan pendidikan.

Buku ini membahas berbagai dimensi pembiayaan pendidikan yang meliputi prinsip-prinsip dasar, sumber-sumber pendanaan, mekanisme distribusi, hingga strategi efisiensi penggunaan dana. Setiap bab dalam buku ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang mendalam, mulai dari konsep dasar hingga praktik terbaik yang relevan dengan konteks pendidikan di Indonesia maupun global. Kami berusaha merangkum teori dan praktik secara seimbang agar pembaca tidak hanya memahami landasan teoretis, tetapi juga mampu mengaplikasikannya dalam berbagai situasi nyata.

Pada bab pertama, kami menguraikan gambaran umum mengenai manajemen pembiayaan pendidikan, termasuk pentingnya perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan

pengawasan dalam penggunaan sumber daya keuangan. Bab ini memberikan landasan penting untuk memahami bagaimana prinsip efisiensi, efektivitas, dan keadilan dapat diterapkan dalam pengelolaan dana pendidikan.

Bab-bab selanjutnya membahas lebih rinci mengenai sumber pembiayaan pendidikan, baik dari pemerintah, masyarakat, sektor swasta, maupun kerja sama internasional. Diversifikasi sumber pembiayaan menjadi salah satu strategi kunci untuk memastikan keberlanjutan dana pendidikan di tengah keterbatasan anggaran. Kami juga menyoroti pentingnya pendekatan inovatif, seperti penggunaan teknologi finansial dan kerja sama lintas sektor, untuk memperluas akses terhadap pendanaan pendidikan.

Mekanisme distribusi pembiayaan juga mendapat perhatian khusus dalam buku ini. Kami menjelaskan berbagai pendekatan distribusi, seperti distribusi berbasis kebutuhan, kinerja, dan ekuitas, yang bertujuan untuk menciptakan pemerataan akses pendidikan di seluruh wilayah. Selain itu, efisiensi dalam pengelolaan dana pendidikan dibahas secara mendalam, termasuk strategi-strategi seperti audit berkala, penggunaan teknologi, dan kolaborasi antarinstansi pendidikan.

Dalam menyusun buku ini, kami merujuk pada berbagai literatur dan hasil penelitian terkini di bidang manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan. Contoh-contoh nyata dari praktik terbaik di Indonesia maupun negara lain juga disertakan untuk memberikan gambaran yang lebih konkret kepada pembaca. Kami berharap pendekatan tersebut dapat mempermudah dalam memahami dan memberikan inspirasi bagi pembaca dalam menerapkan konsep-konsep yang ada.

Kami menyadari bahwa pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk merenungkan peran masing-masing individu dalam mendukung pembiayaan pendidikan, baik melalui partisipasi

langsung maupun kontribusi tidak langsung. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci utama untuk mewujudkan sistem pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan.

Tidak lupa, kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku ini. Ucapan terima kasih khusus kami sampaikan kepada para penyunting, rekan sejawat, dan mitra yang telah memberikan masukan berharga selama proses penyusunan buku ini. Dukungan dan semangat mereka menjadi motivasi besar bagi kami untuk menyelesaikan karya ini.

Kami juga sangat menghargai masukan dari pembaca untuk pengembangan buku ini di masa mendatang. Kami menyadari bahwa pendidikan adalah bidang yang dinamis dan terus berkembang, sehingga pembaruan dan penyempurnaan akan selalu diperlukan agar buku ini tetap relevan dengan tantangan zaman. Semoga buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi para pendidik, pengambil kebijakan, mahasiswa, peneliti, dan siapa saja yang peduli terhadap masa depan pendidikan. Kami berharap bahwa wawasan dan informasi yang disajikan dalam buku ini dapat berkontribusi pada upaya bersama untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, menciptakan generasi yang unggul, dan mendorong kemajuan bangsa.

Akhir kata, kami berharap buku ini dapat menjadi inspirasi dan panduan bagi siapa saja yang ingin memahami dan mendalami manajemen pembiayaan pendidikan. Semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat yang luas dan menjadi salah satu sumbangan kecil kami untuk pendidikan yang lebih baik.

Salam hangat,

Prof. Dr. Ali Idrus, M. Pd., ME.

Dr. Idham Khalik, S.E., M.M.

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xv

BAB 1 GAMBARAN UMUM PEMBIAYAAN MANAJEMEN

PENDIDIKAN	1
1.1 Pendahuluan.....	2
1.2 Pengertian Manajemen	3
1.3 Makna Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan	6
1.4 Konsep dan Manajemen Pembiayaan Pendidikan.....	10
1.5 Prinsip Manajemen Pembiayaan Pendidikan	12
1.6 Rangkuman	15
1.7 Soal Esai.....	16

BAB 2 RUANG LINGKUP MANAJEMEN PEMBIAYAAN

PENDIDIKAN	17
2.1 Pendahuluan.....	18
2.2 Penyusunan Anggaran Pendidikan	19
2.3 Pembukuan Lembaga Pendidikan.....	21
2.4 Audit Lembaga Pendidikan	23
2.5 Jenis-Jenis Audit dalam Sektor Pendidikan	25
2.6 Rangkuman	27
2.7 Soal Esai.....	28

BAB 3 PENYELENGGARAAN PEMBIAYAAN DAN PENDIDIKAN

DI INDONESIA.....	31
3.1 Pendahuluan.....	32
3.2 Klasifikasi Model Pembiayaan	33
3.3 Standar Pembiayaan Pendidikan di Indonesia.....	37
3.4 Sistem Pembiayaan Pendidikan di Indonesia.....	39
3.5 Permasalahan Pembiayaan Pendidikan di Indonesia	41

3.6	Analisis Kebijakan Pembiayaan Pendidikan di Indonesia	45
3.7	Rangkuman	47
3.8	Soal Esai.....	48
BAB 4 SUMBER PEMBIAYAAN PENDIDIKAN		51
4.1	Pendahuluan	52
4.2	Prinsip Pembiayaan Pendidikan	53
4.3	Sumber Pembiayaan Pendidikan Dasar dan Menengah	58
4.4	Sumber Pembiayaan Pendidikan Tinggi	60
4.5	Rangkuman	63
4.6	Soal Esai.....	64
BAB 5 DISTRIBUSI PEMBIAYAAN PENDIDIKAN.....		67
5.1	Pendahuluan	68
5.2	Pengertian Distribusi dalam Konteks Pembiayaan Pendidikan dan Integrasi dengan Teknologi Informasi..	69
5.3	Bentuk Distribusi Pembiayaan Pendidikan	74
5.4	Efisiensi Pembiayaan	76
5.5	Komponen Pembiayaan Pendidikan.....	79
5.6	Rangkuman	82
5.7	Soal Esai.....	83
BAB 6 SIKLUS PEMBIAYAAN DALAM PENDIDIKAN		85
6.1	Pendahuluan	86
6.2	Perencanaan Anggaran Pendidikan	87
6.3	Pelaksanaan Anggaran Pendidikan	89
6.4	Pengelolaan Keuangan dalam Pelaksanaan Pembiayaan Pendidikan.....	92
6.5	Pengawasan Anggaran Pendidikan	94
6.6	Pertanggungjawaban Keuangan Pendidikan	100
6.7	Rangkuman	101
6.8	Soal Esai.....	102

BAB 7 INVESTASI PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	105
7.1 Pendahuluan.....	106
7.2 Landasan Hukum Pembiayaan Pendidikan di Indonesia.....	107
7.3 Manfaat Investasi dalam Pendidikan	111
7.4 Tantangan dalam Investasi Biaya Pendidikan.....	113
7.5 Pendidikan Sebagai Investasi Sumber Daya Manusia..	115
7.6 Posisi Peserta Didik dalam Proses Pendidikan.....	120
7.7 Rangkuman	122
7.8 Soal Esai.....	123
 BAB 8 ANALISIS PEMBIAYAAN PENDIDIKAN	 125
8.1 Pendahuluan.....	126
8.2 Efisiensi dan Efektivitas dalam Pembiayaan Pendidikan	127
8.3 Studi Kasus Pembiayaan Pendidikan diberbagai Negara.....	132
8.4 Inovasi Baru dalam Pembiayaan Pendidikan: Pendekatan Baru dan Solusi Kreatif.....	134
8.5 Rangkuman	137
8.6 Soal Esai.....	138
 BAB 9 AUDIT KEUANGAN PENDIDIKAN.....	 141
9.1 Pendahuluan.....	142
9.2 Definisi dan Dasar Hukum Audit Keuangan	143
9.3 Audit Keuangan Pendidikan: Esensi, Tujuan dan Manfaat.....	145
9.4 Jenis-Jenis Audit Keuangan	148
9.5 Siklus Audit Keuangan.....	151
9.6 Rangkuman	153
9.7 Soal Esai.....	153
 BAB 10 MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH	 155
10.1 Pendahuluan.....	156
10.2 Konsep Manajemen Berbasis Sekolah	157
10.3 Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah pada Bidang Pendidikan	160

10.4 Dampak Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah	162
10.5 Rangkuman	164
10.6 Soal Esai.....	165
 BAB 11 PEMBIAYAAN PENDIDIKAN PADA ERA OTONOMI	
DAERAH.....	167
11.1 Pendahuluan	168
11.2 Penerimaan Anggaran Pendidikan pada Era Otonomi Daerah	169
11.3 Anggaran Pendidikan Melalui Belanja Pemerintah Pusat.....	172
11.4 Kebijakan Desentralisasi Fiskal Melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa.....	175
11.5 Pengeluaran Biaya Pendidikan pada Era Otonomi Daerah	180
11.6 Rangkuman	184
11.7 Soal Esai.....	185
 BAB 12 DIGITALISASI DALAM MANAJEMEN KEUANGAN	
PENDIDIKAN	187
12.1 Pendahuluan	188
12.2 Pengenalan Sistem Digital untuk Pengelolaan Anggaran	189
12.3 Keunggulan Teknologi dalam Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan	190
12.4 Studi Kasus: Implementasi Sistem Digital pada Sektor Pendidikan.....	192
12.5 Tantangan dan Peluang Digitalisasi Pembiayaan Pendidikan.....	196
12.6 Rangkuman	198
12.7 Soal Esai.....	199
 BAB 13 STRATEGI PENGELOLAAN DANA BOS.....	
13.1 Pendahuluan	201
13.2 Prinsip Dasar Pengelolaan Dana Bos.....	202
	203

13.2.1 Akuntabilitas: Pelaporan Penggunaan Dana kepada Pemangku Penetangan	206
13.2.2 Efisiensi: Optimalisasi Alokasi Dana untuk Kebutuhan Prioritas.....	207
13.2.3 Kepatuhan: Mengikuti Aturan dan Regulasi Pemerintah	208
13.3 Langkah-Langkah Strategis Pengelolaan Dana Bos	209
13.3.1 Perencanaan.....	209
13.3.2 Pengelolaan dan Pelaksanaan.....	210
13.3.3 Evaluasi dan Pelaporan	210
13.4 Mekanisme Penyaluran dana Bos.....	211
13.4.1 Penyaluran Dana BOS (2005–2010)	211
13.4.2 Dana BOSDA (BOS Daerah)	212
13.5 Permasalahan Dana Bos	212
13.5.1 Inovasi dalam Pengelolaan Dana Bos	216
13.5.2 Studi Kasus Pengelolaan Dana Bos.....	219
13.6 Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Dana Bos.....	221
13.7 Rangkuman	225
13.8 Soal Esai.....	226
DAFTAR PUSTAKA.....	229
RIWAYAT HIDUP.....	237

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Manajemen Keuangan dalam Siklus Manajemen Lembaga Pendidikan	9
Gambar 2	Penyusunan Anggaran Pendidikan Sekolah Menengah	20
Gambar 3	Klasifikasi Model Pembiayaan	35
Gambar 4	Hubungan Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi di Lembaga Pendidikan	55
Gambar 5	Model Tahapan Pembelajaran dengan TIK	73
Gambar 6	Siklus Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif	95
Gambar 7	Mekanisme Teori Signaling Spence	119
Gambar 8	Model Konseptual Manajemen Pembiayaan Pendidikan Berbasis Mutu	130
Gambar 9	Hubungan Akuntansi dan Audit.....	146
Gambar 10	Kerangka Manajemen Berbasis Sekolah.....	157
Gambar 11	Struktur Transfer ke Daerah dan Desa	176
Gambar 12	Kolaborasi Hexahelix dalam Mendukung Pendidikan Inklusif Berbasis Digital	193
Gambar 13	Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah	204

BAB 1

GAMBARAN UMUM PEMBIAYAAN

MANAJEMEN PENDIDIKAN

Tujuan Pembelajaran

1. Untuk menjelaskan pengertian manajemen.
2. Untuk menjelaskan makna manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan.
3. Untuk menjelaskan konsep dan manajemen pembiayaan pendidikan.
4. Untuk menjelaskan prinsip manajemen pembiayaan pendidikan.

1.1 Pendahuluan

Manajemen pembiayaan pendidikan adalah proses yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan penggunaan sumber daya keuangan di sektor pendidikan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa dana yang tersedia dapat digunakan secara efektif dan efisien guna mendukung pencapaian tujuan pendidikan. Dalam praktiknya, manajemen ini mencakup berbagai aktivitas seperti perencanaan anggaran, pengelolaan pengeluaran, penggalangan dana, serta evaluasi keberlanjutan keuangan.

Keberhasilan manajemen pembiayaan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan mengalokasikan dana, tetapi juga oleh bagaimana dana tersebut digunakan untuk mendukung program-program prioritas. Setiap keputusan terkait pembiayaan harus mempertimbangkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, dan keadilan. Efisiensi berarti meminimalkan pemborosan sumber daya, efektivitas mengacu pada pencapaian hasil yang sesuai dengan tujuan, sementara keadilan memastikan akses pendidikan yang merata bagi semua lapisan masyarakat.

Manajemen pembiayaan pendidikan juga harus mampu merespons dinamika keuangan yang cepat berubah. Misalnya, perubahan kebijakan pemerintah, fluktuasi ekonomi, dan perkembangan teknologi membutuhkan adaptasi strategi

pembiayaan yang fleksibel. Lembaga pendidikan yang memiliki manajemen keuangan yang baik dapat dengan cepat menyesuaikan diri dengan tantangan ini, termasuk melalui inovasi pendanaan seperti penggunaan teknologi untuk pembelajaran atau kolaborasi dengan sektor swasta.

Selain itu, penggunaan dana dalam pendidikan harus diarahkan pada investasi strategis yang memberikan nilai tambah, seperti pelatihan guru, penyediaan infrastruktur yang memadai, dan pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman. Untuk mencapai hal ini, keterampilan dalam pengambilan keputusan berbasis data menjadi sangat penting. Data yang akurat dan relevan membantu manajer pendidikan menentukan prioritas dan mengukur dampak investasi terhadap pencapaian hasil belajar siswa.

Dengan pendekatan yang tepat, manajemen pembiayaan pendidikan dapat menjadi alat yang kuat untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif, berkualitas, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas manajerial di lembaga pendidikan, terutama dalam pengelolaan keuangan, menjadi kebutuhan mendesak di era yang penuh tantangan ini.

1.2 Pengertian Manajemen

Dari teks buku yang disediakan, berikut adalah lima definisi manajemen pembiayaan pendidikan yang diambil dari berbagai sumber, yang telah diinterpretasikan dan disesuaikan dengan konteks pendidikan:

1. Harold Koontz(1972): Manajemen adalah "seni mengatur orang lain untuk melakukan tugas yang akan mencapai tujuan yang diinginkan oleh organisasi." Dalam konteks pembiayaan pendidikan, ini berarti mengatur sumber daya keuangan secara efektif untuk memenuhi tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.

2. Henry Fayol (1949): Mendefinisikan manajemen sebagai proses yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi, dan pengontrolan. Dalam pembiayaan pendidikan, definisi ini mengimplikasikan pentingnya pengaturan yang sistematis dari sumber daya keuangan untuk menunjang semua aspek operasional pendidikan secara koheren dan terkoordinasi.
3. Drucker (1975): Menekankan pada manajemen sebagai praktik yang berdasarkan keputusan pada teori dan fakta. Dalam konteks pembiayaan pendidikan, pendekatan Drucker (1975) mendukung penggunaan data keuangan yang akurat dan analisis mendalam untuk menginformasikan keputusan pengelolaan dana pendidikan.
4. Philip Kotler(2000): Mendefinisikan manajemen sebagai seni dan ilmu dalam memilih target pasar dan memperoleh, menjaga, serta mengembangkan pelanggan melalui penciptaan, pengiriman, dan komunikasi nilai pelanggan. Terapannya dalam manajemen pembiayaan pendidikan dapat dilihat dalam pengelolaan dana yang bertujuan untuk meningkatkan nilai atau kualitas pendidikan yang diberikan kepada siswa.
5. Kaplan dan Norton (1996) : Pencipta Balanced Scorecard yang menekankan pada manajemen strategis sebagai proses transformasi strategi organisasi menjadi tindakan. Dalam pembiayaan pendidikan, pendekatan ini mengadvokasi penggunaan strategi keuangan yang seimbang yang tidak hanya menekankan pada pengendalian biaya tetapi juga pada investasi strategis yang meningkatkan kualitas pendidikan dan hasil pembelajaran.

Manajemen pembiayaan pendidikan merupakan proses terorganisasi yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sumber daya keuangan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Sebagai salah satu disiplin ilmu, manajemen telah menjadi elemen kunci

dalam operasionalisasi lembaga atau organisasi, termasuk sektor pendidikan. Menurut Harold Koontz(1972), manajemen didefinisikan sebagai "seni mengatur orang lain untuk melakukan tugas yang akan mencapai tujuan organisasi." Dalam konteks pendidikan, keterampilan manajerial tidak hanya relevan dalam pengelolaan korporasi tetapi juga penting untuk administrasi pendidikan, khususnya dalam pengelolaan keuangan.

Manajemen pembiayaan pendidikan bertujuan untuk mengalokasikan dana secara strategis, memastikan penggunaannya sesuai dengan prioritas pendidikan, serta mengontrol pengeluaran agar terhindar dari pemborosan atau penyalahgunaan. Proses ini mencakup penyusunan anggaran, pengelolaan pengeluaran, dan audit keuangan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku. Prinsip-prinsip manajemen yang diterapkan dalam pembiayaan pendidikan mencakup berbagai aspek. Perencanaan yang matang membantu lembaga pendidikan menetapkan prioritas dan mengalokasikan sumber daya secara strategis. Pengorganisasian memastikan struktur yang efisien untuk mendukung pelaksanaan program pendidikan. Pengarahan, melalui komunikasi dan motivasi yang efektif, sangat penting dalam mengelola pendidik dan staf pendukung. Terakhir, pengawasan memungkinkan institusi pendidikan memastikan bahwa kegiatan yang direncanakan dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan standar yang ditetapkan.

Penerapan manajemen dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan kini mencakup pemanfaatan teknologi modern dan inovasi terkini untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi keuangan. Kehadiran teknologi informasi telah membuka peluang bagi lembaga pendidikan untuk mengembangkan sistem pengelolaan keuangan yang lebih canggih. Sistem ini tidak hanya mempermudah otomatisasi proses administrasi keuangan tetapi juga memberikan analisis yang mendalam melalui pengolahan data besar

Dengan menerapkan prinsip manajemen yang kokoh dan berorientasi pada hasil, pengelolaan pembiayaan pendidikan menjadi lebih efektif dalam mendukung keberlanjutan operasional lembaga pendidikan. Selain itu, pendekatan ini berkontribusi langsung pada peningkatan kualitas pendidikan yang diselenggarakan. Hal ini menegaskan bahwa manajemen, meskipun memiliki prinsip universal yang tetap, harus mampu beradaptasi dengan konteks spesifik pendidikan. Dalam hal ini, keberhasilan tidak hanya diukur dari efisiensi penggunaan sumber daya tetapi juga dari sejauh mana tujuan pendidikan tercapai, termasuk mendidik generasi penerus yang berkualitas.

1.3 Makna Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan

Manajemen keuangan dalam pendidikan dapat dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan untuk menggerakkan anggota tim dalam menerapkan fungsi-fungsi manajemen. Fungsi-fungsi ini mencakup perencanaan keuangan (penganggaran), pengelolaan seperti pencairan, penggunaan, pencatatan, pemeriksaan, pengendalian, penyimpanan dana, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan institusi, termasuk lembaga pendidikan. Secara garis besar, inti dari manajemen keuangan pendidikan adalah mengatur dana yang tersedia, serta menyiapkan dan menjalankan instrumen administratif guna mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan tidak hanya terbatas pada pengelolaan dana yang dimiliki lembaga pendidikan. Dana tersebut tidak muncul begitu saja, melainkan perlu diusahakan dan diperoleh dari sumber-sumber tertentu, seperti pemerintah dan masyarakat. Dalam konteks ini, anggaran pendidikan menegaskan peran pemerintah dalam menyediakan dana untuk menunjang kegiatan pendidikan.

Manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan keberadaan dan

peran negara sesuai amanat konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat (4) menetapkan bahwa negara wajib mengalokasikan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ketentuan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Implementasinya dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan mengenai APBN, yang terus menggunakan prinsip-prinsip ini dari waktu ke waktu.

Dalam konteks pendidikan, istilah pendanaan Pendidikan merujuk pada aspek-aspek yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya pada BAB XIII Pasal 46 hingga 49. Pendanaan pendidikan memiliki dasar hukum yang lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008. Pasal 1 ayat (3) mendefinisikan dana pendidikan sebagai sumber daya keuangan yang dialokasikan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan. Ayat (4) melengkapi definisi ini dengan menyatakan bahwa pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Pada tingkat yang lebih teknis, istilah pembiayaan pendidikan (*financing education*) dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. BAB IX pasal 62 ayat (5) menetapkan bahwa standar biaya operasi satuan pendidikan harus diatur melalui Peraturan Menteri berdasarkan usulan dari Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Implementasi kebijakan ini menghasilkan peraturan seperti Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 yang mengatur Standar Biaya Operasi Non-Personalia untuk berbagai jenjang pendidikan, termasuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, serta sekolah luar biasa.

Sumber pembiayaan pendidikan berasal dari tiga entitas utama: masyarakat, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2003. Dengan demikian, manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan menjadi aspek yang sangat penting dalam operasionalisasi pendidikan. Secara normatif, sekolah bukanlah lembaga yang berorientasi pada profit. Oleh karena itu, tanggung jawab pembiayaan melibatkan masyarakat, orang tua siswa, dan pemerintah, dengan tujuan utama memastikan bahwa semua penerimaan lembaga pendidikan digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan secara profesional.

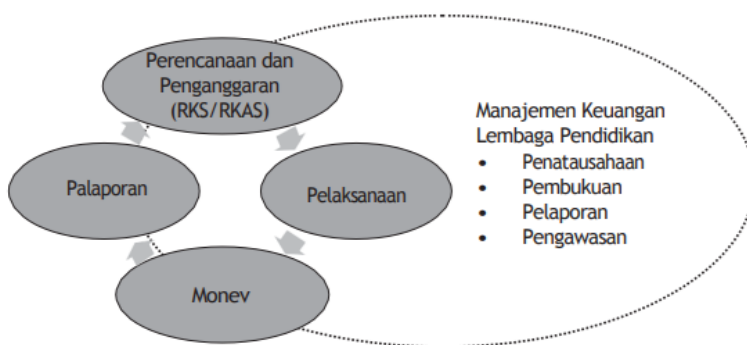
Beberapa prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan dan pembiayaan pendidikan adalah:

1. Transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana.
2. Efisiensi dan efektivitas biaya operasional.
3. Pencegahan penyalahgunaan dana yang terkumpul.
4. Kreativitas dalam menggali sumber pendanaan tambahan.
5. Penempatan tenaga bendahara yang kompeten dan profesional.

Manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan memainkan peran strategis dalam menunjang keberhasilan layanan pendidikan. Dalam kerangka Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), lembaga pendidikan diharapkan mampu merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, serta mempertanggungjawabkan penggunaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah yang menuntut institusi pendidikan untuk mandiri dalam pengelolaan dana.

Kuangan dan pembiayaan pendidikan menjadi komponen produktif yang menentukan keberhasilan layanan pendidikan. Sudarmanto (2009) menunjukkan bahwa biaya sosial dan biaya pribadi memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kualitas pembelajaran dan prestasi siswa. Dengan demikian, setiap aktivitas pendidikan, baik disadari maupun tidak, memerlukan pembiayaan yang dikelola dengan baik untuk

mencapai tujuan pendidikan yang optimal. Manajemen keuangan pendidikan mencakup berbagai aktivitas, mulai dari perencanaan, penatausahaan, pembukuan, pembelanjaan, hingga pengawasan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Proses ini memastikan bahwa dana yang diperoleh dapat digunakan secara efisien dan efektif untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan.



Sumber: Kemendiknas-DBE1-USAID, Pelatihan Manajemen Berbasis Sekolah di Bali (2012)

Gambar 1 Manajemen Keuangan dalam Siklus Manajemen Lembaga Pendidikan

Manajemen keuangan pendidikan mencakup serangkaian kegiatan yang melibatkan pengelolaan sumber daya keuangan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan. Kegiatan ini meliputi identifikasi dan penggalian sumber pendanaan, perencanaan anggaran, pemanfaatan dana, pelaporan, serta pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan. Menurut Abdullah (2011), manajemen keuangan pendidikan bertujuan untuk mengalokasikan dan mengelola dana pendidikan secara efektif sehingga tercapai efisiensi penggunaan dana untuk mendukung pendidikan berkualitas.

Secara operasional, manajemen keuangan pendidikan meliputi tindakan administratif seperti pencatatan, perencanaan anggaran, pelaksanaan penggunaan dana, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan pada institusi pendidikan. Langkah-langkah ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap sumber daya yang tersedia digunakan secara optimal untuk

mendukung keberhasilan pendidikan. Berdasarkan uraian tersebut, manajemen keuangan pendidikan dapat didefinisikan sebagai proses yang mencakup perencanaan, penggalian sumber dana, pembukuan, pelaksanaan anggaran, pengawasan, dan pelaporan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa institusi pendidikan dapat menjalankan fungsinya dengan efisien dan memberikan layanan pendidikan yang berkualitas tinggi.

1.4 Konsep dan Manajemen Pembiayaan Pendidikan

Manajemen pembiayaan pendidikan merupakan upaya penerapan prinsip-prinsip manajemen umum—perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan—dalam pengelolaan keuangan lembaga pendidikan. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan pengalokasian dan pemanfaatan sumber daya keuangan secara efektif, efisien, dan etis guna mendukung pencapaian tujuan pendidikan (Griffin, 2021; Robbins & Coulter, 2022).

1. Perencanaan

Tahap perencanaan bertujuan mengidentifikasi kebutuhan pendanaan berdasarkan sasaran strategis lembaga pendidikan. Proses ini meliputi pengembangan infrastruktur, perluasan program studi, serta peningkatan kualitas pengajaran. Keberhasilan perencanaan sangat bergantung pada pemahaman mendalam tentang prioritas pendidikan dan kemampuan memprediksi secara akurat pendapatan serta pengeluaran di masa depan (UNESCO, 2021).

2. Pengorganisasian

Setelah perencanaan, tahap pengorganisasian berfokus pada pengelolaan sumber daya keuangan untuk menjalankan rencana yang telah disusun. Langkah ini mencakup penyusunan struktur keuangan, penganggaran, serta pengalokasian dana sesuai dengan prioritas strategis yang telah ditetapkan (Griffin, 2021). Sistem pengorganisasian

yang baik mendukung eksekusi rencana keuangan secara optimal.

3. Pengarahan

Pengarahan melibatkan pemberian motivasi dan arahan kepada tim pengelola keuangan untuk memastikan implementasi rencana berjalan dengan baik. Selain itu, pengarahan juga melibatkan pengelolaan arus kas dan memastikan semua unit pendidikan memahami serta mematuhi kebijakan keuangan yang berlaku (Robbins & Coulter, 2022). Aspek ini menitikberatkan pada pengelolaan komunikasi yang efektif dalam tim keuangan.

4. Pengawasan

Pengawasan menjadi elemen penting dalam memastikan kegiatan keuangan berjalan sesuai rencana dan peraturan yang berlaku. Proses ini mencakup audit internal maupun eksternal, pemantauan serta evaluasi anggaran, dan pelaporan keuangan yang transparan (Salmi, 2013). Transparansi keuangan mendukung akuntabilitas, terutama dalam pengelolaan anggaran publik.

Pengelolaan keuangan pendidikan tidak terlepas dari berbagai tantangan yang dapat memengaruhi stabilitas dan keberlanjutan lembaga pendidikan. Tantangan tersebut dan solusinya dijelaskan sebagai berikut:

1. Keterbatasan Dana

Banyak lembaga pendidikan menghadapi kesenjangan pendanaan untuk memenuhi seluruh kebutuhannya. Solusi untuk keterbatasan dana meliputi:

- a) Meningkatkan upaya penggalangan dana.
- b) Diversifikasi sumber pendanaan melalui kemitraan dengan sektor swasta.
- c) Mengembangkan model bisnis yang menghasilkan pendapatan tambahan (Zajda, 2015).

2. Pengawasan Dana yang Kurang Optimal

Pengawasan yang lemah dapat menyebabkan inefisiensi atau bahkan penyalahgunaan dana. Solusi mencakup:

- a) Memperkuat sistem kontrol internal.
- b) Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan.
- c) Menggunakan teknologi keuangan yang memungkinkan pemantauan lebih akurat (UNESCO, 2021).

3. Perubahan Kebijakan Pemerintah

Perubahan kebijakan terkait pendanaan pendidikan dapat mengganggu stabilitas keuangan lembaga pendidikan. Untuk menghadapi tantangan ini, diperlukan:

- a) Advokasi aktif untuk mendukung pendidikan.
- b) Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan kebijakan untuk memengaruhi hasil yang mendukung pendidikan (Salmi, 2013).

4. Ketidaksesuaian Antara Dana dan Kebutuhan

Ketidaksesuaian antara alokasi dana dan kebutuhan prioritas pendidikan sering kali terjadi, namun dapat diatasi dengan cara sebagai berikut:

- a) Pendekatan berbasis data dalam perencanaan dan alokasi anggaran.
- b) Fleksibilitas dalam menyesuaikan rencana keuangan berdasarkan evaluasi dan umpan balik (Zajda, 2015).

1.5 Prinsip Manajemen Pembiayaan Pendidikan

Manajemen pembiayaan pendidikan bertumpu pada sejumlah prinsip mendasar yang menjamin penggunaan dana secara efisien dan efektif. Prinsip-prinsip ini tidak hanya mendukung pencapaian tujuan strategis pendidikan tetapi juga memastikan

keberlanjutan finansial lembaga pendidikan. Berikut adalah prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan pendidikan.

1. Akuntabilitas

Setiap lembaga pendidikan wajib bertanggung jawab atas pengelolaan dana yang diterima. Akuntabilitas diwujudkan melalui pelaporan yang jelas dan sistematis kepada para pemangku kepentingan, seperti pemerintah, donor, dan masyarakat umum. Pelaporan ini mencakup rincian penggunaan dana serta hasil yang telah dicapai, sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap institusi (Griffin, 2021).

2. Transparansi

Transparansi mengharuskan setiap transaksi keuangan dicatat dan dilaporkan secara terbuka. Praktik ini meminimalkan potensi penyalahgunaan dana dan meningkatkan akuntabilitas lembaga pendidikan. Selain itu, transparansi memfasilitasi audit internal maupun eksternal, sehingga keuangan institusi lebih terpantau (Salmi, 2013).

3. Efisiensi

Prinsip efisiensi menekankan pada pengoptimalan penggunaan sumber daya keuangan untuk menghasilkan dampak pendidikan yang maksimal. Lembaga pendidikan harus mampu mengalokasikan dana berdasarkan kebutuhan yang paling mendesak, sekaligus menghindari pemborosan (Robbins & Coulter, 2022).

4. Keadilan

Keadilan dalam pengelolaan keuangan berarti dana dialokasikan secara proporsional sesuai kebutuhan setiap unit atau kelompok dalam institusi. Hal ini mencakup pemberian akses yang setara terhadap sumber daya pendidikan tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau geografis siswa (UNESCO, 2021).